



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263

085720222456

lbmpwnujawabarat@gmail.com

<https://sites.google.com/view/lbm-pwnu-jawa-barat/beranda>

**KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KUBRO  
LBM PWNu JAWA BARAT KE V  
KOMISI A**

**Dalam Rangka Harlah Pondok Pesantren Najaahaan Bayongbong  
Kabupaten Garut Ke 52**



**Garut, 18 Januari 2026 M/29 Rajab 1447 H.**



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263

085720222456

lbmpwnujawabarat@gmail.com

<https://sites.google.com/view/lbm-pwnu-jawa-barat/beranda>

<b>Mushohih</b>	<b>Perumus</b>	<b>Moderator</b>
1. KH. Yusuf Soban 2. KH. Juhadi Muhammad, SH 3. KH. Ubaedillah Harits, M. Pd 4. KH. Ahmad Yazid Fattah 5. KH. Ahmad Muthohar, M. Pd	1. KH. Aceng Amrullah, S. Ag, M. Pd. I 2. Kiai Afif Yahya, SH 3. KH. Muthiullah Hib, Lc 4. KH. Agan Sugandi, S. Pd 5. KH. Ahmad Fidadi 6. KH. Fauzi Yusuf, S.E, S. Pd 7. KH. Aceng Nurzaman, S. Pd 8. KH. Asep Muhammad Rosad	Kiai Rifki Ahmad Husaeri, M. Ag
		<b>Notulen</b>
		Ust. Nurkholis, S. Farm
<b>Narasumber</b>		
1. Komara Nugraha, S. Sos., M. AP (JFT Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, Kedeputusan Bidang Penanganan Darurat BNPB) 2. Dadang Sudardja, SH. Dipl (Ketua LPBI NU Jawa Barat & Ketua Dewan Nasional Walhi)		

## **As'ilah**

### **1. Status 'Bencana Nasional' Dan Tata Kelola Donasi.**

**(Sail: Ponpes. Roudhotul Qu'ran, Geyongan)**

#### **Deskripsi Masalah:**

Hingga deskripsi soal ini disusun, pemberitaan mengenai bencana Sumatra (provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara) masih terus memenuhi lini media nasional. Peristiwa ini merupakan duka bersama yang patut kita rasakan, dan semoga wilayah terdampak beserta para korban dapat segera bangkit dan pulih. Kita juga berharap pemerintah diberi kekuatan dan kelapangan dalam menjalankan tugas penanganan bencana tersebut.

Dalam merespons bencana ini, ekspresi empati dan aksi masyarakat Indonesia tampak sangat beragam. Ada yang bergerak dalam sunyi dengan menyalurkan sebagian hartanya melalui berbagai media yang dipercaya, baik melalui *crowdfunding* berbadan hukum maupun penggalangan dana perorangan yang kerap dilakukan oleh artis dan *influencer*. Ada pula empati yang diwujudkan melalui doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, atau melalui sikap kritis yang disuarakan secara lantang dengan menyoroti kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana. Namun *ala kulli hal*, tujuan dari seluruh ekspresi tersebut pada hakikatnya adalah satu, yakni agar saudara-saudara kita yang terdampak memperoleh penanganan yang tepat dan cepat.

Seiring dengan itu, isu penetapan status 'Bencana Nasional' menjadi salah satu topik yang ramai di perbincangkan dan disuarakan oleh banyak kalangan. Di antaranya Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar melalui laman [mui.or.id](http://mui.or.id) dalam sebuah artikel berjudul 'MUI Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional', disebutkan jika KH Anwar Iskandar meminta agar pemerintah segera menetapkan status musibah tersebut sebagai Bencana Nasional.<sup>1</sup>

*"Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini*

<sup>1</sup><https://mui.or.id/baca/berita/mui-desak-pemerintah-tetapkan-bencana-sumatera-sebagai-bencana-nasional>



## PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263

085720222456

lbmpwnujawabarat@gmail.com

<https://sites.google.com/view/lbm-pwnu-jawa-barat/beranda>

*telah meluluhlantakan seluruh infrastruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, Sabtu (29/11/2025).*

Desakan serupa juga diungkapkan oleh salah satu anggota DPR RI dari Sumatera Barat Mulyadi.

*“Desakan ini disampaikan melihat tingginya tingkat kerusakan serta jumlah korban terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.” kata dia melalui keterangan tertulis diterima di Padang, Sabtu.<sup>2</sup>*

Isu tersebut terus bergulir menuai ragam komentar miring terhadap pemerintah. Akhirnya pemerintah memberi sikap resmi. Lewat Seskab. Tedi Indra Wijaya, pemerintah mengajak masyarakat fokus pada substansi penanganan. Sekalipun bencana Sumatera ini tidak berstatus bencana nasional penanganannya sudah setingkat nasional.

*“Sejak hari pertama, tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya.” Ujar Tedy.*

Selain itu Tedy juga menyatakan bahwa ada 50 ribu personel TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan yang dikerahkan ke Sumatera. Dia juga menjamin dana penanganan bencana di tiga provinsi itu berasal dari APBN senilai Rp 60 triliun. Teddy menepis anggapan pemerintah tidak menangani bencana di Sumatera secara nasional.<sup>3</sup>

Selain isu penetapan status Bencana Nasional, tensi di tengah masyarakat juga sempat meningkat akibat pernyataan Menteri Sosial terkait maraknya penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai komunitas, artis, dan *influencer*. Dalam praktiknya, penggalangan dana tersebut berhasil menghimpun donasi dalam jumlah yang tidak sedikit, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, yang ditujukan untuk meringankan beban para korban bencana.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mulanya ia meminta agar penggalangan perlu mendapatkan izin. Namun kemudian, dalam klarifikasinya menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak melarang penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, pemerintah memberikan apresiasi atas semangat solidaritas dan sikap saling membantu yang ditunjukkan publik. Kendati demikian, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan penggalangan dana tetap perlu memperoleh izin, guna menjamin akuntabilitas dan perlindungan bagi

<sup>2</sup> <https://www.antaranews.com/berita/5275345/anggota-dpr-desak-pemerintah-tetapkan-sumbar-darurat-bencana-nasional>

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-8269500/penegasan-pemerintah-soal-bencana-sumatera-prioritas-nasional>



semua pihak.<sup>4</sup>

Pada kondisi normal, aturan perizinan penggalangan dana mungkin menemukan relevansinya, terutama untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan publik. Namun, di sisi lain, ketentuan tersebut juga berpotensi membuat sebagian pihak enggan menjadi pionir penggalangan donasi, karena keberatan menghadapi kompleksitas administrasi yang harus dipenuhi. Padahal, situasi kebencanaan justru menuntut keterlibatan dan uluran tangan dari seluruh elemen masyarakat guna mempercepat proses pemulihan bencana.

#### Pertimbangan

1. Bencana nasional adalah level pengakuan dampak bencana yang telah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa
2. Dalam buku panduan penetapan status bencana, level keadaan darurat bencana dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:
  - ✓ Level keadaan darurat bencana kabupaten/kota
  - ✓ Level keadaan darurat bencana provinsi
  - ✓ Level keadaan darurat bencana Nasional
3. Ketentuan dan prosedur penetapan status keadaan darurat bencana sesuai levelnya dapat dibaca secara lengkap dalam buku pedoman penetapan status darurat bencana yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (file bisa diunduh melalui barcode dibawah ini)



#### Pertanyaan:

- a. Bagaimana perspektif fikih dalam mengategorikan status suatu bencana, serta apa signifikansi penetapan status tersebut terhadap mekanisme dan kebijakan penanganannya?

#### Jawaban:

- a. Dalam perspektif fikih, kategorisasi bencana pada hakikatnya merupakan mekanisme kebijakan untuk menetapkan skala prioritas (*tafdil*) dalam melakukan langkah pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud di atas merupakan wewenang pemerintah berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian, signifikansi kategorisasi tersebut terletak pada fungsinya sebagai sarana penetapan prioritas penanganan bencana yang disesuaikan ijtihad pemerintah.

<sup>4</sup>[https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/18291561/mensos-klarifikasi-soal-donasi-untuk-bencana-sebaiknya-izin-ke-pemerintah?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap&page=all](https://nasional.kompas.com/read/2025/12/10/18291561/mensos-klarifikasi-soal-donasi-untuk-bencana-sebaiknya-izin-ke-pemerintah?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all)

## Referensi:

### الاشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ فِي مَالٍ بَيَّنَّ الْمَالَ غَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَجِ. قَالَ السُّبْكِيُّ فِي قَتَاوِيهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، فَهَلْ لِعَبْدٍ الْأَحْوَجِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَيَّنَّهُ وَبَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى، إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، مَلَّتْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَاسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ الْمُعْطِي». قَالَ: وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ التَّمْلِيكَ وَالْإِعْطَاءَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا مِنْ الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْلِكَ أَحَدًا إِلَّا مَا مَلَكَهُ اللَّهُ. وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ الْعَدْلِ: تَقَدُّمُ الْأَحْوَجِ وَالنَّسْوِيَةِ بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ فَإِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِمَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ مَلَكَهُمَا قَبْلَ الدُّعَى. وَأَنَّ الْقِسْمَةَ إِنَّمَا هِيَ مُعَيَّنَةٌ لِمَا كَانَ مُبْهِمًا، كَمَا هُوَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا وَبَدَرَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَأْذَنَ بِهِ، كَانَ كَمَا لَوْ اسْتَأْذَنَ بَعْضُ الشَّرَكَاءِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

### تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٣ / ٦٨:

ويأمرهم) أي الناس ندبا (الإمام) أو نائبه ويظهر أن منه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وأن البلاد التي لا إمام بها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها ثم رأيت الأنوار صرح به فقال ويأمرهم الإمام أو المطاع (بصيام ثلاثة أيام) متتابعة (أولا) أي قبل يوم الخروج وبصوم الرابع الآتي وبصوم معهم؛ لأن الصوم يعين على رياضة النفس وخشوع القلب ويأمره بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم – إلى أن قال – وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم

### تشریح جنائی (1/181)

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع للسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – إلى أن قال – القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.

### النجم الوهاج في شرح المنهاج ٩/٤٣٧ – الدميري (ت ٨٠٨)

والإمام هو الذي يتولى الأمور العظام، وهو أعرف بالمصالح من الأحاد

### التهذيب للبعوي ج ٥ ص ١٨٧

أما أراضي الفيء - فخمسها لأهل الخمس، أما أربعة أخماسها - قال الشافعي: هي وقف للمسلمين: تستغل، وتقسم غلتها في كل عام. اختلف أصحابنا فيه. منهم من قال: تصير وقفا بنفسها. ومنهم من قال يقفها الإمام، ثم تصرف غلتها إلى أهل الفيء. وفي قول: إلى المرتزقة. وفي الآخر: إلى المصالح. ومن أصحابنا من قال: إنها للمصالح: تكون وقفا. فإن قلنا: للمرتزقة - يقسمها بينهم - كما قلنا - في أربعة أخماس الغنيمة. والأول أصح، أنه وقف على القولين جميعا؛ يصرف الإمام غلتها إلى مصالحيهم؛ لأن للإمام الاجتهاد في مال الفيء. وكذلك: يجوز أن يُفضل بعضهم على بعض؛ بخلاف الغنيمة: فإنه لا يجوز للإمام تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد.

### الموسوعة الفقهية الكويتية – مجموعة من المؤلفين (٢١ / ١١٢)

٢٧ - وَالْحَامِسُ: إِيْجَابُ الْإِمَامِ لِبَعْضِ التَّكْلِيفِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْقَادِرِينَ عَلَيْهَا لِلْوَفَاءِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ إِذَا

عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا، أَوْ لِلْمُسَاهَمَةِ فِي إِعَاثَةِ الْمُتَضَرَّرِينَ بِزَلْزَالٍ مُدْمِرٍ أَوْ حَرِيقٍ شَامِلٍ أَوْ حَرْبٍ مُهْلِكَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَفْجَأُ النَّاسَ وَلَا يَتَّسِعُ بَيْتُ الْمَالِ لِتَحْمِلِهِ أَوْ التَّعْوِيضِ عَنْهُ (١). لَكِنْ لَا

يَجُوزُ هَذَا إِلَّا بِشُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَتَّعِنَ الْحَاجَةُ. فَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَقُومُ بِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ. الشَّرْطُ الثَّانِي:

أَنْ يَتَّصَّرَفَ فِيهِ بِالْعَدْلِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ بِهِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي سَرَفٍ، وَلَا أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ، وَلَا يُعْطَى أَحَدًا أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ.

الشَّرْطُ الثَّلَاثُ: أَنْ يَصْرَفَ مَصْرُفَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ لَا بِحَسَبِ الْغَرَضِ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْغُرْمُ

عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا إِجْحَافٍ، وَمَنْ لَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ لَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا.



الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَتَفَقَدَ هَذَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَرَبَّمَا جَاءَ وَقْتُ لَا يَفْتَقِرُ فِيهِ لِزِيَادَةِ عَلَى مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَا يُوزَعُ. وَكَمَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي التَّوْزِيعِ، فَكَذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَتِ الصَّرُورَةُ لِلْمَعُونَةِ بِالْأَبْدَانِ وَلَمْ يَكْفِ الْمَالُ، فَإِنَّ النَّاسَ يُجْبِرُونَ عَلَى التَّعَاوُنِ عَلَى الْأَمْرِ الدَّاعِي لِلْمَعُونَةِ بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ وَتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ وَالْإِفْتِقَارِ إِلَى ذَلِكَ (١).

#### حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع – حسن العطار (١ / ٦٨)

قال سم وحاصله منازعة الشارح في اعتبار التجيزي في مفهوم الحكم، وصريح العضد بخلافه. وأقول ما قاله الشارح هو المطابق لظاهر قول المصنف الآتي ولا حكم قبل الشرع ومجرد مخالفة العضد لا تقدر في ذلك للقطع بعد التزام واحد من المصنف والشارح تقليد العضد مع القطع باطلاعهما على كلامه ولم يثبت اتفاق القوم على ما قاله بل لو فرض اتفاقهم عليه جاز لهما المخالفة في ذلك؛ لأنه أمر اصطلاحي ولكل أحد أن يصطلح على ما شاء إذ لا مشاحة في الاصطلاح اهـ.

#### الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٨ / ٦٣٩٣)

ويعبر الفقهاء عن واجب الدولة بتأمين العاجزين عن العمل بدفع ضرر المسلمين إلى حد الكفاية، قال النووي: (من فروض الكفاية: دفع ضرر المسلمين ككسوة عار، وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) وتساءل شارح المنهاج (هل يكفي سد الضرورة، أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة؟ قال: فيه وجهان: قيل: ما يسد الرمق، والأوجه ما يحقق الكفاية) (٢). وقال ابن حزم: (فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكتفون من المطر والصيف والشمس وعيون المارة) (٣).

فعلى الحاكم إذن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء رعاية للمصلحة العامة، وله أن يتوصل لهذه الغاية بما يفرضه من تكاليف وضرائب على الأغنياء بحسب الحاجة بالإضافة إلى فريضة الزكاة (١). لقوله ﷺ: «إن في المال حقاً سوى الزكاة» (٢) وليس هنا مجال التفصيل (٣). وهذا المبدأ في الإسلام شامل لكل المواطنين، سواء أكانوا مسلمين أم ذميين كما أوضح الفقهاء (٤) بدليل أن سيدنا عمر بن الخطاب أسقط الجزية عن شيخ من أهل الذمة، وفرض له من بيت المال ما يكفيه

#### Pertanyaan:

b. Bagaimana fikih mengatur praktik pengumpulan donasi dimaksud, di tengah keberlakuan aturan perizinan serta potensi keengganan masyarakat untuk menjadi pionir penggalangan donasi akibat ketentuan tersebut?

#### Jawaban

b. Pada dasarnya fikih menganjurkan untuk mengumpulkan donasi yang dimaksud. Hanya saja jika tidak ada tata kelola yang baik dari aktifitas tersebut dikhawatirkan adanya dampak-dampak negatif seperti penggalangan donasi fiktif, korupsi oleh oknum pengumpulan dana, tidak ada pelaporan pertanggung jawaban kepada donatur, serta distribusi yang tidak tepat sasaran, penumpukan donasi di satu titik saja dan lainnya, maka pemerintah boleh dan berhak untuk membatasi dan meregulasi pengumpulan dana bantuan.

Pada titik ini, regulasi ini tidak dipahami sebagai langkah menghambat atau menghalangi penggalangan dana, namun harus dipahami sebagai penertiban agar dana yang dikelola dengan baik dan terdistribusi tepat sasaran dan laporan yang konkrit.



## Referensi:

الغياثي لإمام الحرمين ص ١٤٨

مَا كَانَ مِنْهَا شِعَارًا ظَاهِرًا فِي الْإِسْلَامِ، تَعَلَّقَ بِهِ نَظَرُ الْإِمَامِ. وَذَلِكَ يَنْقَسِمُ إِلَى: مَا يَرْتَبِطُ بِاجْتِمَاعٍ عَدَدٍ كَبِيرٍ، وَجَمِّ غَفِيرٍ، كَالْجَمْعِ وَالْأَعْيَادِ وَمَجَامِعِ الْحَجِيجِ. مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاجْتِمَاعٍ، كَالْأَذَانِ وَعَقْدِ الْجَمَاعَاتِ فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِشُهُودِ جَمْعٍ كَبِيرٍ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْطَلَ عَنْهُ، فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا كَثُرُوا عَظُمَ الرَّحَامُ، وَجَمَعَ الْمَجْمَعُ أَحْيَاءًا؛ وَأَلْفَ أَصْنَافًا؛ خِيفَ فِي مُرَدِّهِمُ الْقَوْمُ أُمُورٌ مَخْدُورَةٌ

الفقه على المذاهب الأربعة (193 / 5)

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكمًا أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين – البكري الدمياطي (٨٨ / ٣)

وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفق أسير، أي مثلاً، فله إن كان فقيراً الاكل منه.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - وهبة الزحيلي (٤٩٩٢ / ٧)

يجعل النظام الاقتصادي الإسلامي أبعد عن النظام الرأسمالي القائم في أصله على أساس من الحرية الفردية المطلقة. لذا فإنه يحق للدولة التدخل في الملكيات غير المشروعة، كالملكية الحادثة بالسلب والقهر أو الاغتصاب، فنترد الأموال إلى أصحابها أو تصادرها، وتستولي عليها بغير تعويض، سواء أكانت منقولة أم عقارية، لقوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (١) وقوله: «ليس لعرق ظالم حق» (٢)، وقوله: «من زرع أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته» (٣).

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة، وهو البعد بالملكية عن الشبهات، وعن اتخاذها وسيلة للثراء غير المشروع، وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع، سواء في حق أصل الملكية، أو منع المباح، أو في تقييد حرية التملك الذي هو من باب تقييد المباح، والملكية من المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعمال الملك إلى ضرر عام. وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية الزراعية، فيجدها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك. كما حدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى، وكما فعل عمر بن الخطاب في سبيل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس.

الفقه الإسلامي وأدلته ٦٣٩١/٨

وتلزم الدولة الإسلامية شرعاً بالحفاظ على الأدب وحماية الأخلاق، ومنع المعاصي وردع الفساد وقمع المنكرات وتأديب العصاة حتى تكون الحياة الإسلامية نظيفة من الشوائب بعيدة عن المكدرات وأسباب الفوضى والانحراف. قال الماوردي: (الذي يلزم الإمام إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عبادة من إتلاف واستهلاك) (٤)، وقال علي بن أبي طالب □: (لا بد للناس من إمارة برّة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمين بها السبل، ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفياء) (٥).

Garut, Ahad 18 Januari 2026 M

Wakil Rois Syuriah PWNu Jawa Barat,

KH. Ubaidillah Haris, M. Pd

Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

PWNu Jawa Barat



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263

085720222456

lbmpwnujawabarat@gmail.com

<https://sites.google.com/view/lbm-pwnu-jawa-barat/beranda>

**Ketua,**

**KH. Zainal Mufid, S. Sos, M. Pd**



**Sekretaris,**

**Kiai Afif Yahya Aziz, SH**